



JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	2016	HAL: 12																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

# KPU Minta Rp 39 Miliar

## ■ Koordinasi Pilkada Sanggau 2018

**SANGGAU, TRIBUN** - KPU Sanggau mengajukan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Sanggau 2018 sebesar Rp 39 miliar. Ketua KPU Sanggau Sekundus Ritih mengakui jumlah ini jauh lebih besar dari pilkada sebelumnya yang hanya Rp 14 miliar, namun besaran ajuan tersebut belum final.

"Kita juga akan koordinasi dengan KPU Provinsi, karena akan ada *sharing* dana. Sebab, Pilkada Sanggau bersamaan dengan pilgub. Rakor pertama sudah dilakukan dengan provinsi dengan lima kabupaten lain, sekitar Agustus 2016. Setelah itu nanti akan ada kumpul lagi mematangkannya itu," kata Sekundus kepada *Tribun* Senin, (26/9)

Selain itu, ada beberapa bagian yang mau dicek. "Artinya beberapa item yang berbeda dengan kita ajukan," ujarnya. Pihaknya juga tengah menunggu beberapa aturan dari KPU Pusat. Yang



**Saya kira tidak ada masalah. Makanya nanti ditelaah. Apalagi kita kan ada PKPU yang baru, mungkin ada penyesuaian.**

**Paolus Hadi**  
Bupati Sanggau

terbaru saat ini adalah aturan tentang pencalonan dan kemungkinan akan ada lagi perbaikan-perbaikan.

"Sampai dengan satu bulan lalu, seperti itu. Tapi angkanya bisa saja berubah. Pertama karena ada kemungkinan aturan baru, misalnya seperti pencalonan

yang tadinya sampel menjadi sensus, otomatis biaya bertambah. Ada konsekuensi-konsekuensi itu. Makanya angka kita ini cenderung dinamis. Tahun lalu itu Rp 14 miliar, untuk dua putaran. Kalau sekarang ini kan satu putaran," terangnya.

Rencananya dana Rp 39 miliar itu akan dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun 2017, mengingat KPU Sanggau baru mengusulkan sekitar Agustus-September 2016.

"Tapi itu tergantung lagi Peraturan KPU (PKPU). Untuk memulai tahapan itu berdasarkan PKPU, karena kan serentak untuk daerah, Pilgub, Pileg untuk 2018. Sekarang ini yang ada itu PKPU untuk 2017, kalau di sini itu Landak dan Kota Singkawang," jelasnya.

Dikatakannya, sambil menunggu PKPU, KPU Sanggau terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun Pe-

merintahan Desa (Pemdes). Termasuk adanya kemungkinan pemekaran.

"Karena kan berdampak pada kemungkinan penambahan penyelenggara. Juga terhadap para penyelenggara, kita sudah sosialisasi di sembilan kecamatan. Untuk PPK dan PPS itu kan tak boleh dua periode. Sebagian besar itu akan banyak diubah dan direkrut baru," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sanggau Paolus Hadi mengaku telah menyampaikan usulan anggaran KPU tersebut ke Ketua DPRD. Prinsipnya, kata Wakil Ketua DPC PDIP Sanggau itu, Pemkab Sanggau setuju sepanjang sesuai aturan dan jika memang menjadi kewajiban daerah memenuhinya.

"Saya kira tidak ada masalah. Makanya nanti ditelaah. Apalagi kita kan ada PKPU yang baru, mungkin ada penyesuaian. Soal jumlah, secara pribadi belum bisa mendalami. Ini kan ada tim, nanti ada diskusi. Akan dilihat juga dasar angka-angkanya ini dari mana. Apa yang perlu dibantu pemerintah daerah dalam konteks Pilkada," katanya.

Selain itu, Pemkab akan membandingkan dengan daerah lain yang juga menyelenggarakan Pilkada. "Kita tidak mau tak sesuai aturan. Tapi mudah-mudahan, KPU sendiri mengajukan itu sudah berdasarkan aturan yang ada," pungkasnya. (hen)